

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepemimpinan

##### 1. Defenisi Kepemimpinan

Secara etimologis, kepemimpinan berawal dari kata “pimpin” yang berarti mengarahkan bahkan memimpin. Kepemimpinan sendiri adalah ajaran akan bisa mengubah individu serta orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan dalam menggapai keinginan secara baik. Kepemimpinan bisa diberikan pengertian bahwa kesanggupan orang dalam mengubah bawahan kearah yang lebih baik, baik itu dilakukan secara tidak langsung maupun langsung yang bertujuan agar memahami sepenuhnya apa yang terlibat, secara sadar dan gembira memenuhi keinginan pemimpin.<sup>11</sup>

Kepemimpinan merupakan sebuah yang melibatkan beragam metode untuk mendorong individu atau sekelompok orang agar bergerak menuju pencapaian tujuan bersama. Adapun pendapat para ahli mengenai kepemimpinan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> A. Mintorogo, *Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Yogyakarta: STIA LAN Prees, 1997), 2–10.

<sup>12</sup> A.M Mangunhardjana *Kepemimpinan : Teori Dan Pengembangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 9.

Adapun pendapat dari para ahli mengenai berbagai kepemimpinan. Kepemimpinan Joseph C. Rost, mendefinisikan beberapa kepemimpinan antara lain, kepemimpinan sebagai usaha melakukan harapan-harapan para pemimpin, kepemimpinan sebagai usaha mencapai tujuan kelompok sebagai manajemen, sebagai pengaruh, sebagai watak atau sifat dan sebagai transformasi.<sup>13</sup>

Menurut Ordway Tead, menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan untuk bisa memberi pengaruh kepada orang lain agar mereka bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>14</sup>

Menurut Blancard dan Hesrey, kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi sebuah kegiatan individu dan kelompok untuk bisa meraih tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan juga melibatkan aspek manajemen, pengaruh, karakter seseorang, serta transformasional. Dalam hal ini, kepemimpinan menjadi salah satu cara bagi pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya agar dapat bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>13</sup> Joseph C. Rost, *Leadership For the Twenty-First Century* (Westport: Praeger, 19991), 102.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 20.

<sup>15</sup> Apiaty Kamaludin dan Patta Rapanna, *Administrasi Bisnis* (Jakarta: Sah Media, 2017), 4.

Kepemimpinan menurut Harold Koonts dalam Soekarso, adalah seni membujuk bawahan untuk melakukan pekerjaannya dengan percaya diri dan menunjukkan pentingnya kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan memotivasi anggota tim atau organisasi.<sup>16</sup>

Tiga komponen penting dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut :

a. Pengaruh

Pada dasarnya, kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang lain untuk bergerak ke arah tertentu yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berlangsung melalui perintah melainkan juga melalui keteladanan, komunikasi yang efektif, serta kemampuan membangun kepercayaan, seorang pemimpin memiliki peranan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi individu kelompok agar selaras dengan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah interaksi dinamis yang memungkinkan individu mempengaruhi perilaku dan sikap pengikutnya secara strategis dan berkesinambungan.

b. Motivasi

Kemampuan untuk memotivasi merupakan salah satu kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Hal ini merujuk pada kapasitas seorang pemimpin untuk membangkitkan semangat, dan

---

<sup>16</sup> Soekarso "Kepemimpinan Kajian Teori Dan Praktis", Jakarta: (Prenade Media Group, 2015)

mengarahkan agar mereka terdorong untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal. Motivasi bukan sekedar memberikan dorongan sesaat, melainkan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, penghargaan dan pencapaian. Seorang Pemimpin yang mampu memotivasi dengan baik akan menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat loyalitas dalam tim.

c. Tujuan

Kepemimpinan adalah pencapaian sasaran, pemimpin berfokus untuk mencapai tujuan individu kelompok dan organisasi. Pemimpin dinilai berdasarkan kepuasan individu dalam menjalankan tugasnya dan harus mampu mengembangkan tujuan organisasi dengan kemampuan bawahan agar mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik.<sup>17</sup>

## 2. Fungsi kepemimpinan

Menurut Rivai fungsi bisa diartikan sebagai tugas atau kegunaan dari suatu pekerjaan. Fungsi kepemimpinan sendiri berkaitan secara langsung dengan kondisi sosial di sebuah kelompok atau organisasi. Artinya seorang pemimpin tidak berdiri di luar, tetapi menjadi bagian dinamika sosial suatu kelompok tersebut. karena itu pemimpin adalah

---

<sup>17</sup> Soekarno, *Kepemimpinan Kajian Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenade Media Group, 2015), 13–19.

fenomena sosial yang harus tercermin dalam interaksi antara individu dalam kelompok.<sup>18</sup>

Tugas utama pemimpin adalah mengarahkan, mengelompokkan, memberi arahan, mendidik, membimbing, dan menggerakkan anggotanya supaya anggota atau bawahan mengikuti arahan pemimpin dan menjalankan perannya dengan baik.<sup>19</sup>

Menurut Hackman dan Walton menekankan bahwa efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsi penting yang mendukung kerja tim, baik dalam aspek internal maupun eksternal. pemimpin yang baik bukanlah yang mengerjakan sendiri, melainkan yang menciptakan kondisi di mana tim bisa berhasil.<sup>20</sup>

Ada tiga fungsi utama seorang pemimpin yaitu:

a. Memberi arahan

Memberi arahan merupakan salah satu fungsi penting dari kepemimpinan yang berperan dalam memastikan tercapainya efektivitas kelompok. Pemimpin yang efektif harus mampu mengarahkan kelompok menuju tujuan bersama dengan mencapai

---

<sup>18</sup> Almasyah Syahbuddin dan Andi Agutang, "Fungsi Leadership Dalam Peningkatan Publik Di Kantor Kecamatan Makassar," 122–125.

<sup>19</sup> Ibid., 123.

<sup>20</sup> J. Richard Hackman dan Hackman Walton, *Handbook Of Principles of Organizational Behavior* (Oxford,UK: Blackwell Pulishers, 1990), 72.

intruksi yang menetapkan prioritas kerja, serta menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>21</sup>

Fungsi ini merujuk pada kemampuan pemimpin untuk menetapkan tujuan yang jelas, menyusun prioritas, dan memberikan panduan dan strategis kepada kelompok atau tim yang dipimpinnya. Memberi arahan tidak hanya sekedar menyampaikan perintah, tetapi lebih pada bagaimana pemimpin menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang ingin dicapai, mengapa hal tersebut penting, dan bagaimana cara mencapainya.

Pemimpin yang menjalankan fungsi memberi arahan dengan baik mampu memberikan perhatian dan energi tim ke arah tujuan bersama. Pemimpin juga membantu anggota tim memahami konteks kepemimpinan dari pekerjaan bawahan, menyelaraskan tindakan dengan visi dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi atau masyarakat, serta meminimalkan kebingungan atau konflik akibat ketidakjelasan peran.

b. Motivasi

Fungsi ini berkaitan dengan upaya pemimpin untuk mendorong semangat, komitmen, dan keterlibatan anggota tim

---

<sup>21</sup> J. Richard Hackman dan Hackman Walton, *Handbook Of Principles of Organizational Behavior* (Oxford,UK: Blackwell Publishers, 1990), 78.

dalam mencapai tujuan bersama. Motivasi yang diberikan oleh pemimpin tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek psikologis, seperti penghargaan, pengakuan, rasa memiliki, dan rasa berkontribusi terhadap sesuatu yang bermakna.<sup>22</sup>

Pemimpin yang mampu memotivasi dengan baik akan menciptakan suasana kerja positif dan penuh semangat. Pemimpin memahami kebutuhan, harapan, serta potensi yang dimiliki oleh anggota tim, berusaha mengaktifkan potensi tersebut melalui komunikasi yang membangun, pemberian kepercayaan, serta penghargaan.

c. Mengambil keputusan

Fungsi ini menunjukkan bagaimana pemimpin bertanggung jawab untuk membuat pilihan yang tepat dalam kondisi yang memerlukan langkah cepat, rasional, serta terarah. Keputusan yang diambil pemimpin sangat mempengaruhi arah kerja tim dan keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Kemampuan mengambil keputusan tidak hanya soal memilih di antara berbagai alternatif, tetapi juga mencakup proses pengumpulan informasi, mempertimbangkan resiko dan dampaknya, serta melibatkan orang-orang yang relevan dalam

---

<sup>22</sup> J. Richard Hackman dan Hackman Walton, *Handbook Of Principles of Organizational Behavior* (Oxford,UK: Blackwell Publishers, 1990), 80-85.

proses tersebut. seorang pemimpin yang efektif tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tetapi juga tidak ragu ketika tindakan segera diperlukan. Keputusan yang baik biasanya didasarkan pada pertimbangan yang objektif, masukan dari berbagai pihak, dan pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi yang dihadapi.<sup>23</sup>

### 3. Kepala Desa

#### a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan bagian dari pemerintah atau perangkat Desa yang berperan sebagai pemimpin pelaksanaan dalam pemerintahan di tingkat lembang atau desa. Ia memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lembang, karena mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lembang. Jika program yang direncanakan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah setempat, hal tersebut dapat menghambat kelancaran pembangunan.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ayat 3 mengenai desa, disebutkan bahwa pemerintah Desa dipimpin Kepala Desa atau yang disebut sebagai penguasa tertinggi dan yang dibantu oleh perangkat desa untuk

---

<sup>23</sup> J. Richard Hackman dan Hackman Walton, *Hanbook Of Principles of Organizational Behavior* (Oxford,UK: Blackwell Pulishers, 1990), 85-87.

<sup>24</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020),

menyelenggarakan pemerintah desa. Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) yakni Kepala Lembang bertugas menyelenggarakan pemerintah menjalankan pembangunan lembang, dan pemberdayaan masyarakat lembang.<sup>25</sup>

Kepala Lembang adalah seseorang yang memiliki peran dalam masyarakat dan merupakan perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat lembang dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan lembang dengan efektif.<sup>26</sup>

Kepala Lembang adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat, dengan mengadakan pemilihan Kepala Lembang Dalam pasal 14 (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa melaksanakan pembangunan desa, masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### b. Peran Kepala Lembang

Setiap individu menjalankan peran dan kewajiban yang tidak sama dalam kehidupan sosial, dan dalam melaksanakan, setiap individu menunjukkan sikap atau pendekatan khas. Peran merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang untuk membawa perubahan yang positif serta mewujudkan harapan demi kemajuan.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>26</sup> Febrianisah, *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyash* (Riau: UIN Suska Riau, 2023), 11.

Secara umum, peran merupakan sistem tertentu, dalam struktur organisasi peran individu menjadi lebih rumit dan menantang bergantung pada skala organisasi dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>27</sup>

Peran Kepala Lembang dalam proses pembangunan adalah mengarahkan pencapaian target pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya dan konflik. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja bantuan mempertimbangkan tenaga kerja serta berbagai potensi sumber daya yang dapat di bagi mereka. Keberhasilan pelaksanaan suatu pembangunan tergantung kepada kemampuan aparat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dalam masyarakat berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Efektivitas praktis pembangunan harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh seluruh ekonomi operasional praktis pembangunan.<sup>28</sup>

Menurut Selni Paru dan Markus Kaunang peran Kepala Lembang sangatlah penting dalam proses pembangunan yang meliputi hal-hal berikut:

Kepala Lembang adalah pemimpin lembaga sosial, ia bertugas mengelola data pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan desa. Selain itu, Kepala Lembang juga mengatur

---

<sup>27</sup> wawan, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Skripsi* (Pekanbaru : Universitas Islam Riau 2021), 23.

<sup>28</sup> Ibid.25

bantuan pembangunan lembang termasuk membuat rencana dan laporan kegiatan serta mengkoordinasi pelaksanaannya.

Kepala Lembang juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta ikut serta dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk memajukan lembang<sup>29</sup>

c. Fungsi dan Wewenang Kepala Lembang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Pasal 14 dijelaskan bahwa Kepala Lembang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, kepala lembang memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

- 1) Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD).
- 2) Membuat dan menyusun rancangan peraturan.
- 3) Menetapkan Peraturan desa sebagai dasar hukum di tingkat lokal;

---

<sup>29</sup> Selni Paru dan Markus Kaunang, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2019): 1–3.

- 4) Menyusun serta mengajukan draft peraturan desa
- 5) Membina dan mendorong pengembangan pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan.
- 6) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan desa.<sup>30</sup>

## **B. Tujuan Dana Desa**

Seluruh sumber pendapatan desa digunakan membiayai semua kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta aktivitas di tingkat desa.<sup>31</sup> Dalam kaitanya dengan hal tersebut, prioritas penggunaan dan desa ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai berbagai kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Agar pemanfaatnya lebih efektif, dana tersebut diarahkan untuk mendanai sektor pembangunan dan

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintahan RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa .8

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya penyediaan layanan dasar bagi warga desa.<sup>32</sup>

Prioritas penyaluran dana

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
  - a. Pengembangan layanan kesehatan tingkat desa, termasuk penyediaan pondok bersalin .
  - b. Pengelolaan serta pembinaan kegiatan posyandu.
  - c. pengembangan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Pembangunan Sarana dan Prasaran desa.
  - a. Kegiatan konstruksi dan perbaikan infrastruktur jalan desa.
  - b. Pembangunan dan perawatan jalan usaha tani.
  - c. Pembangunan serta perawatan cekungan atau embung yang berada dalam wilayah desa.
  - d. Pembangunan dan pengelolaan fasilitas air bersih untuk kebutuhan masyarakat desa.
  - e. Pembangunan serta perawatan saluran irigrasi Tersier.

Pembangunan dana desa lebih diprioritaskan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal, agar desa dapat mendorong

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

pertumbuhan wirausaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.<sup>33</sup>

### C. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur menurut Grigg adalah rangkaian fisik yang mencakup transportasi, sistem drainase, serta bangunan dan fasilitas umum lainnya yang penting memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur. Dalam konteks ini, elemen-elemen yang terkait dengan infrastruktur saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur berperan sebagai penghubung yang mungkin keterkaitan antara sistem sosial dan ekonomi.<sup>34</sup>

Ada beberapa macam yang termasuk dalam pembangunan Infrastruktur sebagai berikut.

#### 1. Jaringan Transportasi

Merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai infrastruktur dan fasilitas transportasi yang saling terintegrasi, dengan tujuan mendukung mobilitas dan distribusi barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.<sup>35</sup> Jalan merupakan bagian dari transportasi darat yang

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

<sup>34</sup> Arifa, Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, (Skripsi) (Medan : Universitas Medan Area Medan, 2023), 22.

<sup>35</sup> Mustafa dan Cahyo Sasmito, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2017): 6.

mencakup seluruh jenis fasilitas penunjangnya, yang digunakan untuk berbagai jenis lalu lintas diatas permukaan tanah, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Disisi lain, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa infrastruktur mencakup semua bentuk jenis fasilitas yang dibutuhkan masyarakat umum demi mendukung setiap kegiatan masyarakat di kehidupan sehari-harinya.

## 2. Jaringan utilitas

Jaringan Utilitas adalah infrastruktur yang menyediakan layanan seperti listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi. Jaringan utilitas memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendukung komunikasi dan akses terhadap sumber daya penting.<sup>36</sup>

Dengan demikian, Infrastruktur dapat dipahami sebagai keseluruhan fasilitas, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang dibangun oleh pemerintah atau individu untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat dalam konteks sosial dan ekonomi. Secara umum, Infrastruktur diartikan sebagai penyediaan fasilitas umum yang bersifat fisik seperti jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, sistem pengelolaan limbah, serta penyediaan air bersih. selain itu, infrastruktur juga

---

<sup>36</sup> Margie Civitaria Siahay, *Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia* (Makassar: CV.Tohar Media, 2023), 12.

berperan dalam aspek teknis, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui penyediaan sarana transportasi, distribusi barang dan jasa, dan sebagainya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mustafa dan Cahyo Sasmito, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," 15-20.